

TGL DOKUMEN KASUBAG 3 - 7 - 2019 PERATURAN PER-PARAF INDANG - UNDANGAN

BUPATI LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Kabupaten Gunung Mas, kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 Seri E):
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Dan Kebersihan Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 97, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 85);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 201);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 230).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

18

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Bupati adalah Bupati Lamandau
- 5. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat DLHK adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau.
- 6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat DPU dan PR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau.
- 7. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan seharihari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- 8. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- 9. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
- 10. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah Kebijakan Dan Strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah kabupaten yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH KABUPATEN

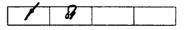
Bagian Kesatu Umum Pasal 2

- (1) Jakstrada kabupaten memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan Tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan



- b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
 - c. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program Kabupaten dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah;
- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Jakstrada kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH

Bagian Kesatu Umum Pasal 7

(1) Jakstrada Kabupaten sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang kabupaten dan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten.

1 81

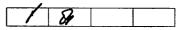
- (2) Jakstrada Provinsi menjadi pedoman bagi semua Daerah dalam menyusun dan menetapkan Jakstrada kabupaten.
- (3) Apabila Jakstrada Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (2), belum ada, maka penyusunan Jakstrada Kabupaten berpedoman pada Jakstranas.
- (4) Penyusunan Jakstrada kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan dengan pendampingan oleh Menteri, kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada kabupaten, Bupati melalui OPD teknis bertugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Jakstrada kabupaten;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada kabupaten; dan
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kabupaten kepada gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) OPD teknis sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - c. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah; dan
 - d. Kecamatan Se Kabupaten Lamandau.
- (3) Bupati melalui DPU dan PR bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah kabupaten.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan kepada Bupati.
- (3) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (4) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur dengan indikator:
 - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;



- d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
- e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
- f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), disusun dalam bentuk laporan Jakstrada kabupaten.
- (6) Terhadap laporan Jakstrada kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan evaluasi oleh bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dikoordinasikan kepada Bupati melalui:
 - a. pembandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (8) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada kabupaten.

BAB IV PENDANAAN Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada kabupaten berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

KASUBAG
PERATURAN PER- PARAF
UNDANG-UNDANGAN

Ditetapkan di Nanga Bulik, pada tanggal 1 Juli 2019

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 1 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

MASRUN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

PAHUN 2019 NOMOR 604

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI LAMANDAU

NOMOR 18 TAHUN 2019

TANGGAL 1 JULI 2019

TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN LAMANDAU

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN LAMANDAU

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Lamandau

INDIKATOR				TAI	HUN			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (ton/tahun)	9.480	9.669	9.859	10.048	10.238	10.333	10.428	10.617
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten	1.706	1.933	2.168	2.411	2.661	2.789	2.919	3.185

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Lamandau

INDIKATOR				TAH	IUN			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Sampah								
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	9480	0.660	0.050	10.040	10.020	10 222	10.400	10.617
Sampah Rumah Tangga dalam	9460	9.669	9.859	10.048	10.238	10.333	10.428	10.617
Jakstrada (ton/tahun)								
Target Penanganan Sampah Rumah								
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Rumah Tangga dalam Jakstranas								
Target penanganan sampah Rumah								
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah	6.920	7.735	7.394	7.435	7.473	7.439	7.403	7.431
Rumah Tangga Kabupaten								

Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 1 Juli 2019

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 1 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

MASRUN

TGL DOKUMEN
3-7-2019
PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

TGL DOKUMEN
3-7-2019

PARAF

DWL

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 18 TAHUN 2019 TANGGAL 1 JULI 2019 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN LAMANDAU

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2018 - 2025

No. KEBIJAKAN	STARATEGI	MAGOOM	C A TYLIA NI		1	TAHUN	UN				0.71.710	D. 170
		MUNICONII	SALOAN	2018 2019	9 2020	2021	2022	2023	2002	5000	IFFAMA	SENTOR PENDITEINO
I. Peningkatan kinerja	a. Penyusunan norma,	 Penyusunan dan kaji ulang standar 	Dokumen/Tahun		+	 					OMINIO	DNONOGNET
pengurangan	standar.	sarana dan										
Sampah	prosedur, dan	prasarana										
Rumah	kriteria (NSPK)	pengurangan										
Tangga	dalam	Sampah Rumah										
dan	pengurangan	Tangga dan										
Sampah	Sampah	Sampah Seienis										
Sejenis	Rumah Tangga											
Sampah	dan Sampah	Tangga, meliputi :						***				
Rumah	Sejenis	a) Pembatasan		-								
Tangga	Sampah	timbulan Sannah		-	1	ı		ı		_ _ ;	Jinas	Dinas PUPR,
	Rumah Tangga	Rumah Tangga							•	<u>:</u>	Lingkungan	Dinas Koperasi,
		dan Sampah								<u></u> :	Hidup dan :: :	UKM.
		Sejenis Sampah								<u>Ā</u>	Kenutanan	Perdagangan dan
		Rumah Tangga										Perindustrian
··		<u>a</u>	Dokumen/Tahun	1			-			-		00110
			•	•			-			_ 	Ulitas	Dinas PUPK,
		Tangga dan								3 =	cingkungan Halam dan	mas koperası,
		Sampah Sejenis					- -				ridup dan Kebuteses	OKM.
		Sampah Rumah			•					4	nemanam	rerdagangan dan
		Tangga										remnausman
		aatan	Dokumen/Tahun				-			-		
		Sampah Rumah	•				-			<u>-</u>	Ullias Linglemagen	
		Tangga dan			-					3 <u>1</u>	DingKungan Lidup don	
		Sampah Sejenis								11.	idup dan skutenen	
		Sampah Rumah				-				<u> </u>	nemanam	

													
KEBIJAKAN	STARATEGI	PROGRAM	SATHAN			~		HUN				SEKTOR	SEKTOR
,	1		OM OM OM	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	UTAMA	PENDUKUNG
	b. Penguatan	bersama, peraturan bersama, atau kerja sama dalam a) Pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga b) Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga dan Sampah		2018 dengan	2019	2020	TAI 2021	2022				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pendidikan DPRD Kabupaten, Dinas PUPR, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
c.	komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di	Pertemuan/tahun	_	2	2	2	2	2	2		Lingkungan Hidup dan	DPRD Kabupaten, Dinas PUPR, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
	<u> </u>	b. Penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan	b. Penguatan kordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Daerah bersama, peraturan bersama, atau kerja sama dalam a) Pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah	b. Penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Daerah 1) Penyusunan keputusan bersama, atau peraturan bersama, atau kerja sama dalam aj Pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah	b. Penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Daerah b. Penguatan kerjasama antara pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Daerah Daerah Daerah Dokumen/Tahun timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rejenis	Tangga Date	b. Penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah b. Penguatan kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah bersama, atau kerja sama dalam a) Pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah	b. Penguatan koordinasi dan keputusan bersama, antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Daerah Pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga pengurangan Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan S	Tangga Tangga Tangga Tangga Tangga Tangga Dokumen/Tahun persuman keputusan keputusan kerjasama antara Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Daerah Dokumen/Tahun persuman kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan	Tangga De Penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Daerah Daerah Daerah Di Penyusunan keputusan bersama, atau kerjasama dalam al Pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga dan Pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga d	D. Penguatan koordinasi dan keputusan keputusan bersama, antara Pemerintah Daerah Daer	Tangga D. Penguatan koordinasi dan kejasama hersama, atara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Daerah D. Penguatan koordinasi dan kejasama dalam antara Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Dokumen/Tahun dinbulan, pendauran ulang, dan pemanlaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanlaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah	Tangga D. Penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Daerah

No.	KEBIJAKAN	STARATEGI	PROGRAM	SATUAN				TA	HUN				SEKTOR	SEKTOR -
		Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	UTAMA	PENDUKUNG
		Rumah Tangga d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan ,kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Advokasi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga kepada: a) Pemerintah Pusat	K/L	1	1	1	1	1	1	1		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja dan
			b) Pemerintah Provinsi	Daerah	1	1	1	1	1	1	1		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Transmigrasi, Dinas PUPR, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Pemerintah
			c) DPRD Kabupaten		1	1	1	1	1	1	1		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kabupaten Dinas PUPR, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Pemerintah Kabupaten
		2	Pelaksanaan training of trainers pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang,	Kecamatan	1	1	1	1	1	1	1		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Pemerintah Kabupaten



r		1												
No.	KEBIJAKAN	STARATEGI	PROGRAM	SATUAN			-		HUN				SEKTOR	SEKTOR -
			dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	UTAMA	PENDUKUNG -
			Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kecamatan/ Kelurahan 3) Pembentukan	Vacamatau										
		e. Pembentukan	bank sampah induk di Kecamatan	Kecamatan	-	1	-	1	-	1	-		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pemerintah Kabupaten
		sistem informasi	Pengembangan Jejaring nasional data operasional Bank sampah dan TPS3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) di Kabupaten	Kecamatan	-	1	-			1	-	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Komunikasi dan Informatika, Pemerintah
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1) Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui KIE secara formal dan informal	Kecamatan									Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kabupaten Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Pemerintah Kabupaten
			2) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman	Kecamatan									Pemerintah Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

ſ -	Г													
No.	KEBIJAKAN	STARATEGI	PROGRAM	SATUAN	2018	2019	2020	TA 2021	HUN 2022	1 0000	T 0004	T 000=	SEKTOR	SEKTOR .
			berbasis masyarakat		2016	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	UTAMA	PENDUKUNG Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Pemerintah
			3) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis kawasan 4) Edukasi antara	Kecamatan									Pemerintah Kabupaten	Kabupaten Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Pemerintah Kabupaten
		. Donous and a	lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi			1			1		1		Pemerintah Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Pemerintah Kabupaten
		penerapan dan pengembangan sistem insentif		Unit/Tahun	-	1	-	1	-	1	-		Dinas Lingkungan Hidup dan	Badan Keuangan Daerah, Pemerintah

l	1		T											
No.	KEBIJAKAN	STARATEGI	PROGRAM	SATUAN			7		HUN				SEKTOR	SEKTOR
		dan disintensif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	mendapatkan KUR		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	UTAMA Kehutanan dan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	PENDUKUNG Kabupaten, Dunia Usaha
		Sampah Rumah Tangga	pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kelompok orang/Bank Sampah/ Tahun	-				1	1	1		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dar Perindustrian, Badan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten
			3) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (beyond compliance)	Kawasan/ Tahun		1		1	-	1	-		Kehutanan	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Badan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten



		T												
No.	KEBIJAKAN	STARATEGI	PROGRAM	SATUAN				TA	HUN				SEKTOR	SEKTOR
]		h. Penguatan			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	UTAMA	PENDUKUNG
		h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga	pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Produsen/ Tahun	-	1	_		1	-	-	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Pemerintah Kabupaten, Manufaktur, Ritel, Jasa Makanan dan Minuman
		Sejenis Sampah Rumah Tangga												
2.	Peningkatan a	a. Penyusunan	1) Penyusunan dan	Dokumen										
	kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	NSPK	kaji ulang standar biaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen									Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Dinas PUPR	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Keuangan Daerah, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Pemerintah Kabupaten
			2) Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir				1						Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Dinas PUPR	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Keuangan Daerah, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Pemerintah Kabupaten
			3) Penyusunan dan I kaji ulang standar atau kriteria	Ookumen									Dinas Lingkungan Hidup dan	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan

No.	KEBIJAKAN	STARATEGI	PROGRAM	SATUAN				TAI	HUN	٠.			SEKTOR	SEKTOR
				DITT OITH	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	UTAMA	PENDUKUNG
			teknologi ramah lingkungan yang terbaik (best available technology) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang							2020	2027		Kehutanan, Dinas PUPR,	Perindustrian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Kabupaten
			meliputi pengangkutan, pengolahan, dan											
			pemrosesan akhir		-				_					
			Sampah Rumah	Dokumen									Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR	Pemerintah Kabupaten
			Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen]]	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR	Pemerintah Kabupaten
			Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen]]]	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR	Dinas Perhubungan, Pemerintah Kabupaten
			d) Pengolahan l	Dokumen								——— 	Dinas	Pemerintah

	T													
No.	KEBIJAKAN	STARATEGI	PROGRAM	SATUAN				TAI	IUN				SEKTOR	SEKTOR
			Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	UTAMA Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR	PENDUKUNG Kabupaten
			e) Pemrosesan akhi Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	r Dokumen									Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR	Pemerintah Kabupaten
			5) Penyusunan dan kaji ulang prosedur operasional standar penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga, meliputi: a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga	Dokumen									Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR	Pemerintah Kabupaten
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen									Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR	Pemerintah Kabupaten
			Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen									Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR	Dinas Perhubungan, Pemerintah Kabupaten
			d) Pengolahan	Dokumen									Dinas	Pemerintah

														
No.	KEBIJAKAN	STARATEGI	PROGRAM	SATUAN				TAI	HUN			·····	SEKTOR	SEKTOR .
				OHI OHIV	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	UTAMA	PENDUKUNG
			Sampah Rumah Tangga dan									-	Lingkungan	Kabupaten
			Sampah Sejenis							l			Hidup dan Kehutanan,	•
			Sampah Rumah										Dinas PUPR	
			Tangga										Dillas I OI K	
			e) Pemrosesan akhir	Dokumen									Dinas	Pemerintah
			Sampah Rumah										Lingkungan	Kabupaten
1			Tangga dan										Hidup dan	
			Sampah Sejenis										Kehutanan,	
	i l		Sampah Rumah										Dinas PUPR	
j			Tangga 6) Menetapkan											
i			sistem											
			pemantauan dan											
			evaluasi kegiatan											
			penanganan											
			Sampah Rumah											
			Tangga dan											
			Sampah Sejenis											
			Sampah Rumah								İ			
			Tangga, meliputi :											
			a) Pemilahan Sampah Rumah	Dokumen									Dinas	Dinas PUPR,
			Tangga dan										Lingkungan	Pemerintah
			Sampah Sejenis								İ		Hidup dan	Kabupaten
			Sampah Rumah					ĺ	ļ				Kehutanan	
			Tangga			1								
				Dokumen										D! DIIDD
			Sampah Rumah			ł	Ì						Dinas	Dinas PUPR, Pemerintah
			Tangga dan										Lingkungan	Kabupaten
			Sampah Sejenis										Hidup dan	rabupater
			Sampah Rumah										Kehutanan	
			Tangga											
ĺ			c) Pengangkutan	Dokumen			-							Dinas PUPR,
			Sampah Rumah Tangga dan					1	ĺ		Ì		Dinas	Dinas
			Sampah Sejenis							Ì			Lingkungan	Perhubungan,
			Sampah Rumah										Hidup dan	Pemerintah
i			Tangga										Kehutanan	Kabupaten
				Dokumen										D' DI IDD
			Sampah Rumah										Dinas	Dinas PUPR, Pemerintah
			Tangga dan			ĺ							Dinas Lingkungan	Kabupaten
	ļ	l	Sampah Sejenis										Hidup dan	navupaten
			Sampah Rumah										Kehutanan	



			T											
No.	KEBIJAKAN	STARATEGI	PROGRAM	SATUAN				TA	HUN		······································		SEKTOR	SEKTOR .
				OHI OHI	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	UTAMA	PENDUKUNG
		İ	Tangga											
		1. 10.	e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	r Dokumen									Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR, Pemerintah Kabupaten
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam: a) Penyediaan lahan										Pemerintah Kabupaten Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Badan Keuangan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Keuangan Daerah, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Dinas PUPR,
		-	c) Anggaran	Diseasailean										Pemerintah Kabupaten
			penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi	Disesuaikan dengan	perencar	ıaan dar	ı keman	ipuan P	emerintz	ah Daera	h		Pemerintah Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR, Badan Keuangan Daerah

No.	KEBIJAKAN	STARATEGI	PROGRAM	SATUAN				TAI	HUN				SEKTOR	SEKTOR
ŀ				ONTONIA	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	UTAMA	PENDUKUNG
			pemilahan,			*******	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>					1 Die Chord
			pengumpulan,											
			pengangkutan,											1
1			pengolahan, dan											
			pemrosesan akhi	_!										
			d) Teknologi	Dokumen									Dinas	Dinas
			Penanganan										Lingkungan	Pendidikan dan
İ			Sampah Rumah										Hidup dan	Kebudayaan
ļ			Tangga dan										Kehutanan,	nebudayaan
			Sampah Sejenis										Dinas PUPR,	
			Sampah Rumah										Direct For K,	
			Tangga yang											
			meliputi								1			
			pemilahan,										-	
			pengumpulan,											
			pengangkutan,											
			pengolahan, dan								i			
			pemrosesan akhir											
			2) Pembangunan dan	Unit									Pemerintah	Dinas PUPR
[- D	revitalisasi TPA						_				Kabupaten	
		c. Penguatan	Penguatan	Pertemuan/tahun		1							Dinas	DPRD,
		komitmen	komunikasi eksekutif										Lingkungan	Pemerintah
		lembaga	dan legislatif dalam										Hidup dan	Kabupaten
		eksekutif dan legislatif di	penanganan Sampah										Kehutanan,	•
		pusat dan	Rumah Tangga dan										Dinas PUPR	
		daerah dalam	Sampah Sejenis										*	
			Sampah Rumah								İ			
		anggaran	Tangga di pusat dan daerah serta											
			pelaksanaan forum				Ì							
		Rumah Tangga	komunikasi								l			
		dan Sampah	pengelolaan Sampah					İ						
			Rumah Tangga dan								ŀ			
			Sampah Sejenis			1		j						
			Sampah Rumah				1		1	ļ				
			Tangga di pusat dan	:		1							!	
			daerah			1								
İ	i	·	Pelaksanaan training		-									
			of trainer penanganan				1		}			1	Dinas	Dinas Koperasi,
		kepemimpinan	Sampah Rumah										Lingkungan	UKM,
		, kelembagaan.	Tangga dan Sampah										Hidup dan	Perdagangan dan
		dan sumber	Sejenis Sampah							}			Kehutanan,	Perindustrian,
			Rumah Tangga, yang										Dinas PUPR	Pemerintah
		penanganan	meliputi pemilahan,									İ		Kabupaten
			-1 1		<u> </u>						L			

				T											
No.	KEBIJAKAN	STA	ARATEGI	PROGRAM	SATUAN					HUN				SEKTOR	SEKTOR
		Rui dar Sej Sar Rui	n Sampah enis mpah <u>mah Tangga</u>			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	UTAMA	PENDUKUNG -
		sist	em ormasi	Pengembangan Jejaring nasional data dasar sistem pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga, pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan operasionalisasi TPA yang diintegrasikan dengan SILH di										Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Badan Keuangan Daerah, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Dinas PUPR, Dinas Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Kabupaten
		kete mas	guatan erlibatan syarakat alui KIE	penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kabupaten									Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
				Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di masyarakat	Kabupaten									Pemerintah Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas

	Γ														
No.	KEBIJAKAN	1	STARATEGI	PROGRAM	SATUAN				TA	HUN				SEKTOR	SEKTOR
					0211 02114	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		PENDUKUN
ł															Komunikasi d
ļ	I											}			Informatika,
															Dinas Sosial,
	:			3) Pelaksanaan	Kabupaten		ļ								
				pemilahan	_									Dinas Lingkungan	Dinas
				Sampah Rumah										Hidup dan	Lingkungan Hidup dan
				Tangga dan Sampah Sejenis										Kehutanan	Kehutanan,
		-		Sampah Rumah											Dinas PUPR,
		j		Tangga di kawasar	ما										Dinas
					•										Pendidikan d
1															Kebudayaan,
1															Dinas
		-						1							Komunikasi d Informatika,
Ì				1) Pomeranda											Dinas Sosial
- [4) Pengembangan model pemilahan											Dirias cosiai
				Sampah Rumah											
				Tangga dan											
				Sampah Sejenis											
				Sampah Rumah			}								
				Tangga melalui:					Ì						
				a) Jumlah unit bank sampah di	Unit/tahun				1					Dinas	Dinas Kopera
				masyarakat						Į				Lingkungan	UKM,
		1		masyarakat					ĺ					Hidup dan	Perdagangan
l								}						Kehutanan,	Perindustrian
İ														Pemerintah	Pemerintah
	l			b) Kawasan (TPS3R)	Kabupaten		-							Kabupaten	Kabupaten
	l						- 1				İ	j		Dinas PUPR, Dinas	Dinas PUPR,
														Lingkungan	Dinas Lingkungan
	ł													Hidup dan	Hidup dan
								1]					Kehutanan,	Kehutanan,
		}												Pemerintah	Dinas Kopera
												İ		Kabupaten	UKM,
															Perdagangan
															Perindustrian
	ļ	σ.	Pononomanada	D' 1											Pemerintah Kabupaten
	ľ	_ا لح	nengembangan	Peningkatan peran	Pelaku Usaha									Dinas	Badan Keuan
	1		skema	pelaku usaha melalui tanggung jawab sosial										Lingkungan	Daerah, Dinas
				dan lingkungan untuk							İ			Hidup dan	Sosial, Dinas
						<u></u>								Kehutanan	PUPR, dan

.		1													
No.	KEBIJAKAN	,	STARATEGI	PROGRAM	SATUAN		,		AT	HUN				SEKTOR	SEKTOR
			operasional, dan pemeliharaan	penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	UTAMA	PENDUKUN pelaku usaha
		I	Penguatan penegakan hukum	Tangga 1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, Jaksa, Polisi,Pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir 2) Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional	Orang								I L F	Kehutanan,	Dinas Perhubungan Kepolisian, Kejaksaan Kepolisian, Kejaksaan, Satpol PP dan Damkar
				penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk kegiatan										Dinas PUPR	
				pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir											

		<u></u>												
No.	KEBIJAKAN	STARATEGI	PROGRAM	SATUAN			г	7	HUN				SEKTOR	SEKTOR .
		i. Penguatan keterlibatan pelaku usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah	Pengintegrasian pengurusan izin penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan	Kabupaten	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	UTAMA Kemendagri	PENDUKUNG Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR, Kepolisian, Kejaksaan, Pemerintah Daerah
		j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	1) Pelaksanaan diseminasi informasi teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir										Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR	Dinas Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Kabupaten
			Penangkapan dan pemanfaatan gas Metana menjadi sumber energi listrik di TPA]	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR	DPRD, Pemerintah Kabupaten
			B) Penerapan teknologi pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan menjadi energi	Kabupaten]] []	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR	Badan Keuangan Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Kabupaten



			T											
No.	KEBIJAKAN	STARATEGI	PROGRAM	SATUAN				TA	HUN			··	SEKTOR	CEVTOD
				SATI GATA	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
		k. Penerapan dar	terbarukan						1					TENDORON
		pengembangar sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	mekanisme dan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi	Dokumen									Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Koperas UKM, Perdagangan d Perindustrian, Pemerintah Kabupaten
			pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kabupaten									Dinas	Dinas Koperas
			insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat J Pembentukan dan	Kabupaten									Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR	UKM, Perdagangan d Perindustrian, Badan Keuang Daerah, Pemerintah Kabupaten
		4	penerapan sistem disinsentif bagi Kelurahan/Desa yang tidak melakukan penanganan berbasis masyarakat Pembentukan dan]	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR, Pemerintah Kabupaten	Pemerintah Kabupaten
			penerapan sistem insentif bagi pengelola kawasan yang melakukan pengelolaan berbasis kawasan melalui kegiatan	awasaN								I F F	Dinas Jingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR, Pemerintah Kabupaten	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan d Perindustrian



No.	KEBIJAKAN	STARATEGI	PROGRAM	SATUAN				TAI	HUN				SEKTOR	SEKTOR
		o IIII di II di	TROGRAM	SATOAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	UTAMA	PENDUKUNG
			pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan											
			5) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi pengelola kawasan yang tidak melakukan pengelolaan berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan	Kawasan									Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR, Pemerintah Kabupaten	Pengelolan Kawasan Permukiman, Kawasan komersial, Kawasan industri, Kawasan khusus, fasilitas umum dan fasilitas sosial

Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 1 Juli 2019

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 1 Juli 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

MASRUN

TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM PENGELOLAAN SAMI'AH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN LAMANDAU PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 18 TAHUN 2019 TANGGAL 1 JUL | 2019 LAMPIRAN III

PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA FORMAT LAPORAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH

Tahun:

Nama Kabupaten:

I. Format Laporan

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan) Capaian H	Capaian	•••	ambatan Penyelesaian Hambatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(5)	ļ
W 407							
		And a second sec					

Untuk pengisian tabel di atas:

- 1. Kolorn (1) diisi dengan nomor;
- 2. Kolom (2) dan (3) diisi sesuai Kebijakan dan Strategi yang ada di dalam Lampiran II; 3. Kolom (4) diisi dengan program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah,
- Contoh: penyusunan Peraturan Bupati/Peraturan Tentang Pengurangan Sanipah Plastik;
- Kolom (5) diisi dengan jumlah dan satuan target yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
 Kolom (6) diisi dengan jumlah dan satuan target yang berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
 Kolom (7) diisi dengan penjelasan hal-hal yang menjadi kendala tidak terlaksananya target dalam kolom (5);
 Kolom (8) diisi dengan penjelasan cara penyelesaian dari hambatan dalam kolom (7).

II. Tabel Laporan Capaian Pengurangan dan Penanganan Sampah

No	Indikator	Targ	get	Capaia	an
110	murkator	Ton	%	ton	%
1	Timbulan Sampah				
2	Pengurangan				
3	Penanganan				

Keterangan:

Data yang dimasukkan adalah jumlah rekapitulasi timbulan, target, dan capaian pengurangan dan penangan sampah di Kabupaten.

Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 1 Juli 2019

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 1 Juli 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

MASRUN

FERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

TGL DOKUMEN
3 - 7 - 2019
PARAF

PARAF